



Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Penyelenggaraan Wisata Religius Semana Santa Larantuka

Zakharias Pelate Demon Muda Makin^{1*}, Jacob Wadu², Theny I.B.K Pah³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: endikdemonsl@gmail.com^{1*}, jacob.wadu@staf.undana.ac.id², kurniatipah@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: endikdemonsl@gmail.com¹

Abstract: This study aims to analyze the role of the Regional Government of Flores Timur Regency in the implementation of the religious tourism event of Semana Santa in Larantuka. The study is motivated by the increasing number of pilgrims, which has not been fully supported by adequate infrastructure and governance management. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and included local government officials, religious leaders, organizing committee members, community members, and pilgrims. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, and credibility was ensured through source and technique triangulation. The findings indicate that the local government has performed its roles as motivator, facilitator, and dynamizer as proposed by Pitana and Gayatri. However, implementation remains suboptimal, particularly in equitable public outreach, provision of facilities such as accommodation and clean water, and cross-sector coordination. Community participation serves as the main supporting factor, while limited infrastructure and the absence of structured official guidelines constitute major constraints. The study recommends strengthening governance through more planned, participatory, and sustainable strategies to enhance the quality of Semana Santa as a leading religious tourism destination.

Keywords: Flores Timur; Local Government Role; Religious Tourism; Semana Santa; Tourism Governance

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan wisata religius Semana Santa Larantuka. Kajian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah peziarah yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan tata kelola pariwisata. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling dan terdiri atas unsur pemerintah daerah, tokoh agama, panitia, masyarakat, dan peziarah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan peran sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisor sebagaimana dikemukakan Pitana dan Gayatri (2005). Namun, pelaksanaannya belum optimal, terutama dalam pemerataan sosialisasi, penyediaan sarana prasarana seperti penginapan dan air bersih, serta koordinasi lintas sektor. Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung utama, sementara keterbatasan infrastruktur dan belum tersedianya panduan resmi yang terstruktur menjadi faktor penghambat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola yang lebih terencana, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Semana Santa sebagai destinasi wisata religius unggulan.

Kata kunci: Flores Timur; Pariwisata Religi; Peran Pemerintah Daerah; Semana Santa; Tata Kelola Pariwisata.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam sehingga berpotensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Keanekaragaman destinasi, mulai dari wisata alam, budaya, hingga religi, menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara (Yoeti, 1996). Secara konseptual, wisata merupakan perjalanan sementara ke luar tempat tinggal untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau menikmati keunikan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan. Pariwisata tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang memengaruhi masyarakat di wilayah tujuan.

Salah satu bentuk pariwisata yang berkembang pesat adalah wisata religi. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) mencatat bahwa sekitar 300–330 juta wisatawan internasional setiap tahun mengunjungi situs religius utama dunia, atau sekitar seperempat dari total wisatawan global. Di Indonesia, salah satu destinasi wisata religi yang memiliki nilai historis dan spiritual tinggi adalah Semana Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Tradisi yang telah berlangsung berabad-abad ini merupakan hasil inkulturasi ajaran Katolik yang dibawa misionaris Portugis dengan budaya lokal (Mulyati, 2019). Berbagai ritual seperti Prosesi Jumat Agung dengan delapan Armida, Tikam Turo, dan Rabu Trewa menjadi ciri khas yang memperkuat identitas religius dan budaya masyarakat setempat.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Semana Santa sebagai destinasi unggulan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 serta memasukkannya dalam Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Larantuka. Data Disparbud Flores Timur (2024) menunjukkan peningkatan jumlah peziarah pascapandemi, dari 25.835 orang pada 2023 menjadi 24.442 orang pada 2025, dengan kontribusi signifikan dari peziarah luar dan dalam Keuskupan Larantuka. Namun, peningkatan jumlah kunjungan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. Data Bapenda Flores Timur (2024) mencatat total ketersediaan kamar hotel dan homestay hanya 241 unit, jumlah yang tidak sebanding dengan lonjakan ribuan peziarah setiap tahun.

Keterbatasan fasilitas pendukung menjadi tantangan utama, antara lain minimnya akomodasi, krisis air bersih yang hanya mengalir setiap tiga hingga empat hari, keterbatasan lahan parkir, serta kondisi jalan yang sempit dan rusak. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan pemerintah daerah, Gereja, aparat keamanan, dan masyarakat belum berjalan optimal. Keterbatasan anggaran yang masih bergantung pada APBD serta kontribusi pihak ketiga yang tidak tetap turut menjadi kendala dalam penyelenggaraan yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi, mengelola, mengembangkan, dan mengalokasikan anggaran bagi sektor pariwisata. Dalam konteks Semana Santa, peran tersebut mencakup penyediaan infrastruktur, promosi, koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dalam penyediaan homestay dan layanan pendukung (Ratna Medi, 2018). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan antara potensi besar Semana Santa sebagai ikon wisata religi nasional dengan kesiapan sarana dan tata kelola pendukungnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan wisata religi Semana Santa Larantuka guna mengidentifikasi strategi pengelolaan yang lebih terencana, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan, memperkuat pelestarian budaya, serta memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat lokal.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Peran dan Peran Pemerintah Daerah

Peran dipahami sebagai pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam struktur sosial (Widayatun, 1999; Friedman, 1998). Soekanto (2002:243) menegaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status; ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia sedang menjalankan peran. Peran mencakup norma yang melekat pada posisi sosial, konsep perilaku yang diharapkan, serta kontribusi individu terhadap struktur masyarakat. Narwoko dan Suyanto (2010:160) menyebutkan bahwa fungsi peran meliputi pemberian arah sosialisasi, pewarisan nilai dan norma, pemersatu kelompok, serta mekanisme kontrol sosial. Dalam konteks organisasi, teori peran menjadi kerangka konseptual untuk memahami perilaku institusional dan pencapaian tujuan (Dougherty & Pritchard, 1985 dalam Bauer, 2003).

Pemerintah daerah, berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan kepala daerah beserta perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adisasmita (2011) menekankan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat serta pengelola pembangunan daerah. Davey (dalam Adisasmita, 2011:14) menguraikan lima fungsi pemerintah daerah, yaitu penyediaan pelayanan publik, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan, fungsi perwakilan, serta fungsi koordinasi dan perencanaan.

Dalam pengembangan pariwisata, Pitana dan Gayatri (2005) mengklasifikasikan peran pemerintah daerah sebagai: (1) motivator, yang mendorong partisipasi dan investasi sektor terkait; (2) fasilitator, yang menyediakan infrastruktur, regulasi, dan kemudahan pelayanan; serta (3) dinamisator, yang menggerakkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga peran tersebut menjadi landasan analitis dalam melihat keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan wisata religi.

Konsep Pariwisata dan Wisata Religi

Secara etimologis, pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta “pari” (berulang) dan “wisata” (perjalanan), yang berarti perjalanan yang dilakukan berulang kali (Yoeti, 1987:103). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Wisata religi merupakan bentuk perjalanan yang berkaitan dengan aktivitas spiritual atau kunjungan ke tempat suci dan bersejarah (Siti, 2015). Karyono (1997) menyebut wisata ziarah (pilgrim tourism) sebagai perjalanan ke tempat suci atau makam tokoh yang diagungkan untuk memperoleh berkah dan ketenangan batin.

Pengembangan pariwisata menurut Yoeti (1997) merupakan upaya terencana untuk memperbaiki dan meningkatkan produk wisata agar memiliki daya saing. UU No. 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi pengembangan industri pariwisata (Ismayanti, 2010; Yoeti, 2008), destinasi pariwisata (Wilopo & Hakim, 2017), pemasaran (Wahab, 1988), serta kelembagaan pariwisata melalui penguatan organisasi dan sumber daya manusia (Suryawan, 2017). Dengan demikian, pengembangan destinasi wisata religi menuntut keterpaduan aspek industri, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan.

Konsep Semana Santa

Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti “Pekan Suci” dan merupakan rangkaian ritual Paskah yang dilaksanakan selama tujuh hari oleh umat Katolik di Larantuka (Djawang, 1987; Narasatriangga dkk., 2018). Tradisi ini berakar dari Andalusia, Spanyol, pada masa Reconquista, dengan prosesi religius yang menampilkan simbol sengsara Kristus (Los Pasos) sebagai sarana edukasi iman (Canoves, 2012; Sanchez et al., 2016). Di Larantuka, tradisi ini diwariskan oleh misionaris Portugis dan mengalami proses inkulturasi dengan budaya lokal (Jebarus, 2017; Monteiro, 2020).

Menurut Mulyati (2019), inkulturasi tersebut tercermin dalam ritual khas seperti Tikam Turo dan Rabu Trewa, serta transformasi fungsi Korke (rumah adat) menjadi kapela kecil dengan simbol salib. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga nilai sosial dan ekonomi serta menjadi ikon toleransi antarumat beragama di Flores Timur (Tukan, 2011). Pengelolaan devosi berada di bawah tanggung jawab Confraria yang terintegrasi dengan Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka dan otoritas Gereja setempat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pengembangan wisata religi Semana Santa Larantuka. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan menjelaskan fenomena secara mendalam tanpa menggunakan prosedur statistik, melainkan menekankan pada pemahaman hubungan antar gejala dalam konteks alamiah (Djoyomartono, 1995). Penelitian ini bersifat naturalistik, yakni dilakukan pada kondisi yang wajar dan tidak dimanipulasi, dengan keterlibatan langsung peneliti di lapangan (Arikunto, 2002). Lokasi penelitian berada di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai pusat penyelenggaraan Semana Santa dan kawasan strategis wisata religi.

Fokus penelitian diarahkan pada peran pemerintah daerah dalam tiga dimensi utama, yaitu sebagai motivator (memberikan imbauan dan mendorong partisipasi masyarakat), fasilitator (menyediakan dan memperbaiki sarana-prasarana pendukung), serta dinamisator (memberikan arahan, menyusun panduan, dan menjembatani koordinasi antara pemerintah, tokoh agama, dan pelaku wisata) sebagaimana dikemukakan Pitana dan Gayatri (2005). Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2017), yaitu pihak yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam penyelenggaraan Semana Santa. Informan berjumlah 15 orang, terdiri atas Kepala Dinas Pariwisata (1 orang), wisatawan/peziarah (5 orang), masyarakat (5 orang), tokoh agama (2 orang), dan panitia penyelenggara (2 orang). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur (Sugiyono, 2007), observasi langsung di lokasi kegiatan, serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2005) yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi temuan (Sugiyono, 2007). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata Semana Santa di Larantuka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan wisata religius Semana Santa Larantuka menggunakan kerangka teori Pitana dan Gayatri (2005), yaitu peran sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Berdasarkan temuan lapangan, penyelenggaraan Semana Santa dilaksanakan melalui Panitia Semana Santa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 62 Tahun 2025, yang melibatkan unsur pemerintah daerah, gereja, lembaga adat, aparat keamanan, serta masyarakat. Struktur kepanitiaan mencerminkan kolaborasi lintas sektor dalam aspek religius, budaya, dan pariwisata.

Peran sebagai Motivator

Sebagai motivator, Pemerintah Daerah berperan melalui pemberian imbauan, dukungan moral, serta dorongan partisipasi masyarakat. Pemerintah menghimbau sekolah, biara, dan kantor kelurahan untuk menyediakan penginapan sementara bagi peziarah, serta mengatur hari libur dan rekayasa lalu lintas selama prosesi. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa imbauan tersebut belum dilakukan secara merata dan belum menjangkau masyarakat luas secara langsung. Sebagian masyarakat menyatakan partisipasi mereka lebih didorong oleh kesadaran tradisional dan nilai religius yang telah mengakar sejak abad ke-16, bukan semata karena dorongan pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah telah memberikan ruang partisipasi, seperti dukungan terhadap sistem transportasi laut dan apresiasi kepada masyarakat yang terlibat. Secara umum, partisipasi masyarakat tergolong tinggi dan berbasis kesadaran kolektif, tetapi peran pemerintah sebagai motivator dinilai belum optimal dan belum inklusif menjangkau seluruh wilayah Kota Larantuka.

Peran sebagai Fasilitator

Dalam peran sebagai fasilitator, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti penerangan jalan, posko kesehatan di Katedral Reinha Rosari, Kapela Tuan Ma, dan Kapela Tuan Ana, posko terpadu, pengamanan oleh TNI/Polri, armada transportasi laut dan darat, serta penginapan sementara di sekolah dan balai pertemuan. Pemerintah juga memberikan dukungan logistik dan anggaran kepada panitia.

Meskipun demikian, berbagai keterbatasan masih ditemukan, seperti kurangnya ketersediaan air bersih (air mengalir setiap tiga hingga empat hari sekali), keterbatasan toilet umum, dermaga dan fasilitas pelabuhan yang belum memadai, akses jalan alternatif yang rusak, serta lahan parkir yang sempit sehingga menimbulkan kemacetan saat puncak prosesi. Beberapa perbaikan fasilitas dilakukan mendekati hari pelaksanaan sehingga dinilai kurang maksimal dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun dukungan pemerintah

tergolong cukup baik dalam aspek teknis, efektivitas penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana masih belum memadai untuk mendukung skala kunjungan yang terus meningkat.

Peran sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, Pemerintah Daerah berperan dalam koordinasi lintas sektor serta pengaturan teknis penyelenggaraan, termasuk tata tertib umum, rekayasa lalu lintas, pengaturan penyeberangan laut ke Desa Wureh, dan pengamanan prosesi laut maupun darat. Pemerintah terlibat dalam rapat koordinasi bersama gereja dan aparat keamanan, serta menyediakan dukungan dana.

Namun, penelitian menemukan bahwa peran sebagai penghubung antara pemerintah, tokoh agama, dan pelaku wisata belum berjalan optimal. Koordinasi sering dinilai terlambat dan kurang menyentuh kebutuhan mendasar, seperti penginapan dan fasilitas dasar. Selain itu, belum tersedia panduan resmi yang terstruktur dari pemerintah dalam bentuk buku atau regulasi tertulis yang komprehensif; sebagian besar panduan teknis dan spiritual berasal dari pihak gereja dan Confreria. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih berperan sebagai pendukung teknis daripada penggerak utama koordinasi lintas sektor.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama penyelenggaraan Semana Santa adalah partisipasi masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan, serta dukungan fasilitas dasar dari pemerintah. Tradisi yang telah berlangsung sejak sekitar tahun 1510 menjadikan Semana Santa sebagai identitas religius dan budaya masyarakat Flores Timur.

Adapun faktor penghambat meliputi: (1) kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat di luar pusat paroki; (2) keterbatasan sarana dan prasarana seperti penginapan, air bersih, sanitasi, dan transportasi; (3) perbaikan fasilitas yang tidak berkelanjutan; serta (4) belum adanya panduan resmi pemerintah yang terstruktur.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur telah menjalankan peran sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam penyelenggaraan wisata religius Semana Santa. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dan optimal, terutama dalam aspek pemerataan partisipasi, keberlanjutan infrastruktur, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Penguatan tata kelola yang lebih terencana, inklusif, dan berkelanjutan diperlukan agar Semana Santa tidak hanya terjaga nilai religiusnya, tetapi juga mampu berkembang sebagai destinasi wisata religi yang nyaman dan berdaya saing.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan Semana Santa sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Pemerintah telah berperan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator, namun himbauan dan partisipasi masyarakat belum merata, fasilitas seperti penginapan, air bersih, dan infrastruktur masih terbatas, serta koordinasi dan panduan resmi belum sepenuhnya efektif. Keberhasilan Semana Santa banyak didukung oleh partisipasi masyarakat dan bantuan fasilitas pemerintah, tetapi masih terdapat hambatan seperti kurangnya koordinasi, keterbatasan sarana prasarana, dan perbaikan yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, pemerataan partisipasi, dan perencanaan infrastruktur yang lebih baik agar penyelenggaraan Semana Santa semakin berkualitas dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur perlu memperkuat perannya dalam penyelenggaraan Semana Santa dengan meningkatkan himbauan langsung dan pelibatan aktif seluruh masyarakat secara merata, termasuk melalui strategi komunikasi dan edukasi yang inklusif hingga ke wilayah terpencil. Selain itu, diperlukan perencanaan jangka panjang yang terstruktur dalam penyediaan dan peningkatan sarana prasarana seperti penginapan, air bersih, toilet umum, penerangan, jalan, dan dermaga agar kenyamanan serta keamanan peziarah terjamin secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengawasan di lapangan, serta segera menyusun dan menerbitkan panduan resmi yang jelas dan mudah diakses guna memastikan pelaksanaan Semana Santa berjalan tertib, kondusif, dan terorganisir dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Majid, M. (2005). *Pengembangan pembelajaran: Konseptual dan praktis*. PT Remaja Rosdakarya.
- Adisasmita, R. (2011). *Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah*. Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (6th ed.). Rineka Cipta.
- Arliman, R. (2019). Pembangunan pariwisata dalam perspektif ekonomi sosial dan politik. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1), 45-59. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v16i1.86>
- Bauer, M. W. (2003). *Theories of social change: A critique*. Sage Publications.
- Canoves, G. (2012). The origins and evolution of Semana Santa in Andalusia: A study of the religious and cultural practices. *Journal of Spanish History*, 15(2), 134-150.

- Davey, M. (2011). Regional government functions. In R. Adisasmita (Ed.), *Pemerintahan daerah dan otonomi daerah: Teori dan praktik* (pp. 14-15). Penerbit Graha Ilmu.
- Djawang, S. (1987). *Semana Santa di Larantuka: Ritual, tradisi, dan peranannya dalam masyarakat Flores Timur*. Penerbit Nusantara.
- Djoyomartono, S. (1995). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan aplikasi*. Penerbit Bumi Aksara.
- Dougherty, D., & Pritchard, A. (1985). Role theory and organizational behavior. *Journal of Organizational Behavior*, 6(4), 339-356.
- Fransiskus Daniel Mautitina. (2024). Peran kelembagaan dinas pariwisata dalam memfasilitasi penyelenggaraan Semana Santa di Kabupaten Flores Timur.
- Friedman, M. (1998). *Sosiologi peran: Teori dan aplikasi*. Penerbit Andi.
- Gunawan, A. (2016). Potensi pariwisata Indonesia dalam meningkatkan perekonomian daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 4(2), 101-114.
- Hike Bin Ambo Tua. (2017). Peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata budaya di Flores Timur.
- Ismayanti, I. (2010). *Pengantar pariwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Ismayanti, L. (2010). *Industri pariwisata dan pengembangannya*. Penerbit Media Indonesia.
- Jebarus, B. (2017). *Sejarah dan tradisi Semana Santa di Larantuka: Peninggalan misionaris Portugis*. Penerbit Katolik Press.
- Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), Juli 2024. *Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Flores Timur* (Ferdinandus Ngau Lobo, Emilianus Harun Liwun, Gabriel Amsikan). Universitas Katolik Widya Mandira.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- Karyono, B. (1997). *Wisata ziarah: Konsep dan penerapan dalam masyarakat*. Penerbit Andi.
- Karyono. (1997). *Dasar-dasar ilmu pariwisata*. Bandung: Mandar Maju.
- Medi, R. (2018). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Negara*, 5(3), 7-19.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Monteiro, J. (2020). Misi dan tradisi Portugis di Larantuka: Pengaruhnya terhadap prosesi Semana Santa. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 10(3), 290-305.
- Mulyati, S. (2019). Inkulturasi adat istiadat, agama, dan kepercayaan dalam prosesi Semana Santa di Larantuka. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 15(2), 43-56.
- Narasatriangga, A., dkk. (2018). *Semana Santa: Tradisi Pekan Suci Paskah dalam perspektif budaya Katolik di Larantuka*. *Jurnal Agama dan Budaya*, 9(4), 930-950.
- Narwoko, R., & Suyanto, S. (2010). *Sosiologi: Suatu pengantar* (Edisi revisi). Kencana.
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2013*. Tentang pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Flores Timur.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat*. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52.

- Pitana, I. G., & Gayatri, P. (2005). *Pengembangan pariwisata: Suatu pendekatan manajerial*. Penerbit Andi.
- Pitana, I. Gede & Gayatri, Putu G. (2005). *Sosiologi pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Ratna Medi, A. (2018). *Pengembangan pariwisata dan infrastruktur: Perspektif pemerintah daerah*. Surabaya: Media Pariwisata.
- Ratna Medi. (2018). *Pengembangan sumber daya alam untuk pariwisata berkelanjutan*. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan*, 6(2), 35-50.
- Sanchez, A., et al. (2016). Semana Santa sebagai ikon pariwisata ziarah: Studi kasus di Spanyol dan aplikasinya di Indonesia. *International Journal of Tourism Studies*, 20(1), 75-87.
- Sari, M. (2010). *Ziarah dan tradisi masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, S. R., & E, S. (2005). Pengaruh pariwisata terhadap pembangunan ekonomi: Studi kasus di beberapa daerah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 3(1), 22-34.
- Sari, S. R., & E, S. (2005). *Pengertian dan konsep dasar pariwisata*. Bandung: Cendekia Press.
- Sari, W. (2010). Tradisi ziarah dan pengaruhnya terhadap pariwisata di Indonesia. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 2(1), 48-59.
- Siti. (2015). Wisata religi dalam perspektif dakwah Islam. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 9(2), 101-110.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryawan, I. B. (2017). *Manajemen kelembagaan kepariwisataan*. Denpasar: Udayana University Press.
- Tukan, T. (2011). *Semana Santa: Ikon toleransi antar umat beragama di Flores Timur*. Penerbit Daerah Flores Timur.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- UNWTO (United Nations World Tourism Organization). (2018). *Tourism highlights 2018 edition*. UNWTO Publications.
- Wahab, S. (1988). *Manajemen pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Widayatun, S. (1999). *Peran sosial dalam masyarakat*. Ghalia Indonesia.
- Wiersma, W. (1986). *Research methods in education: An introduction* (5th ed.). Allyn & Bacon.
- Wilopo, R., & Hakim, L. (2017). *Manajemen destinasi pariwisata*. Malang: UB Press.
- Yoeti, O. A. (1987). *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Yoeti, O. A. (1997). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Yoeti, O. A. (2008). *Pengantar industri pariwisata*. Bandung: Angkasa.